

# ***Gaming Democracy: Ketika Kuasa Ekonomi dan Politik Mempermainkan Demokrasi Indonesia***

***Farhan Abdul Majiid***

(Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia)

Seperti apa sebenarnya kondisi Ekonomi Politik Indonesia dewasa ini? Dengan melihat kondisi yang ada, kita dapat menyebut bahwa demokrasi Indonesia tengah dipermainkan oleh elit untuk melanggengkan kekuasaan dan memupuk kekayaan, bukan memperluas kesejahteraan. Tulisan ini akan menguraikannya ke dalam tiga bagian. Pada bagian pertama, kita perlu menelisik adanya jurang ketimpangan yang semakin melebar sebagai prakondisi ekonomi Indonesia. Berikutnya, di dunia politik, institusi politik yang ada belum mampu membebaskan politisi maupun konstituen dalam mengekspresikan aspirasi politiknya, alih-alih justru membelenggu mereka sehingga menciptakan tekanan vertikal dan horizontal. Semua hal ini kemudian membawa kita pada demokrasi yang dipermainkan, sehingga alih-alih mewujudkan janji kesejahteraan dan keadilan, yang terjadi adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakadilan yang semakin tajam.

## Ketimpangan yang Menganga

Jika kita melihat rilis daftar orang terkaya di dunia, kita akan menemukan adanya anomali ketika melihat data terkait Indonesia. Orang-orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan orang terkaya dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Data Forbes tahun 2024 dapat menggambarkan besarnya jurang ketimpangan antara si kaya dengan si papa. Berdasarkan data tersebut, kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang pendapatan rata-rata nasionalnya lebih tinggi dari Indonesia. Mirisnya, ketika dilihat industri yang dikembangkan oleh para orang terkaya, kebanyakan berada dalam sektor ekstraktif. Hal ini berarti kekayaan mereka tidak berdampak banyak bagi proses industrialisasi lebih luas dan justru semakin menajamkan posisi Indonesia dalam kutukan sumber daya alam. Ini perlu menjadi perhatian serius karena dominasi sektor ekstraktif, dalam berbagai penelitian disebut, berkait erat dengan merebaknya korupsi dan kristalisasi oligarki.

Negara	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand	Philippines
Total kekayaan Top 10 orang terkaya dalam Milyar Dolar AS	172.5	42.2	67.2	60.3	54.85

Tabel 1 Total Kekayaan Top 10 Orang Terkaya di 5 Negara Asia Tenggara tahun 2024 dalam Milyar Dolar AS (Sumber: Forbes)

Merujuk pada data lainnya yang bersumber dari *World Inequality Database*, pada tahun 2023, pendapatan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 17,8% pendapatan rumah tangga nasional (tabel 1). Data porsi kekayaan menunjukkan situasi yang lebih mengesankan. 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 32,3% kekayaan rumah tangga nasional (tabel 2). Porsi ini merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Padahal, PDB per kapita Indonesia bukanlah yang tertinggi di Asia Tenggara, lebih-lebih purata pendapatannya.

Memang, di sisi lain, angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Laporan BPS sudah menunjukkan kemiskinan di Indonesia berada di kisaran 10% dalam dua tahun terakhir. Bahkan, pada tahun 2024, angka kemiskinan Indonesia sudah menyentuh 8,57%. Walaupun demikian, angka kemiskinan ini kurang dapat menggambarkan ketimpangan yang sesungguhnya. Apalagi, data dari BPS dapat menimbulkan pertanyaan tambahan. Dengan PDB per Kapita Indonesia

tahun 2023 sebesar 4.876,3 Dolar AS, sulit untuk menerima standar kemiskinan sebesar 595.242 Rupiah per kapita per bulan, yang jika dikalikan dengan kurs tengah tahun 2023 (1 Dolar AS = 15.241 Rupiah), maka dengan pendapatan per kapita per tahun sebesar 468.67 Dolar AS, sudah tidak dianggap miskin. Standar ini hanya sepersepuluh dari PDB per kapita per tahun Indonesia di tahun tersebut.

Sebagai pembanding, laporan *Macro Poverty Outlook* Bank Dunia 2025 menunjukkan kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi. Sebagai negara yang masuk ke dalam kategori berpenghasilan menengah ke atas, jumlah orang miskin di Indonesia tercatat berada di angka 60.3%. Jika menggunakan standar kemiskinan negara menengah ke bawah sekalipun, masih tercatat 15.6% orang Indonesia tergolong miskin.

Jika menelisik pada data yang diolah, perbedaan ini bukan karena adanya data yang berlainan, melainkan standar penghitungan kemiskinan yang tidak sama. Standar kemiskinan BPS dapat dikatakan tergolong terlampau kecil, bahkan di bawah standar negara berpenghasilan menengah ke bawah dari Bank Dunia. Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia pun tampak berhasil ditekan. Betapapun perbedaan interpretasi data itu terjadi, besarnya porsi

penduduk miskin sekaligus tingginya jumlah kekayaan yang dimiliki oleh orang terkaya menyiratkan ketimpangan ekonomi yang buruk. Situasi ini juga menunjukkan sistem ekonomi yang belum berkeadilan. Sebab, golongan kaya menikmati pertumbuhan ekonomi nasional dalam porsi yang lebih besar ketimbang kelas bawah apalagi kelas menengah.

<b>Negara</b>	<b>Porsi Pendapatan 1% Orang Terkaya</b>
Laos	20,3%
Thailand	19,7%
Kamboja	19,0%
<b>Indonesia</b>	<b>17,8%</b>
Filipina	16,9%
Myanmar	16,6%
Vietnam	15,7%
Malaysia	14,6%
Singapura	13,6%
Brunei Darussalam	12,9%

Tabel 2 Porsi pendapatan 1% orang terkaya dari total pendapatan nasional di 10 negara Asia Tenggara tahun 2023  
(Sumber: *World Inequality Database*)

Negara	Porsi Kekayaan 1% Orang Terkaya
Thailand	34,6%
Indonesia	32,3%
Singapura	30,5%
Malaysia	27,4%
Laos	27,1%
Filipina	26,5%
Kamboja	25,4%
Vietnam	24,9%
Myanmar	24,6%
Brunei Darussalam	23,5%

Tabel 3 Porsi Kekayaan 1% orang terkaya dari kekayaan seluruh penduduk di 10 negara Asia Tenggara tahun 2023 (Sumber: *World Inequality Database*)

Ketimpangan yang buruk dapat menjadi salah satu penyebab dari kekecewaan warga negara terhadap demokrasi. Sebab, demokrasi dianggap tidak mampu memenuhi janjinya dalam redistribusi kekayaan. Memang, tidak semua negara demokrasi memiliki komitmen dalam redistribusi kekayaan pada masyarakatnya. Akan tetapi, sebagaimana disebut oleh Carles Boix (2003), tuntutan terhadap demokratisasi di sebuah negara berakar dari keinginan warga negara untuk mendistribusi kekayaan yang ada di dalam negara tersebut. Sebab, negara demokrasi cenderung lebih mampu dalam menjamin kesempatan

mendapatkan kekayaan sekaligus meregulasi pajak yang lebih berkeadilan ketimbang dalam negara Feodal.

Dengan merujuk literatur lain, artikel teranyar Fukuyama dkk. menekankan pentingnya bagi demokrasi untuk memenuhi janji pertumbuhan ekonomi. Ketika negara tidak mampu memberikan buah dari pembangunan bagi masyarakat, maka masyarakat akan mempertanyakan kemampuan demokrasi untuk memberikan keuntungan bagi mereka, yang pada akhirnya berkorelasi dengan kepuasan pada demokrasi (Fukuyama et al., 2025).

## **Politik yang Membelenggu**

Jika politik dapat kita pahami sebagai pengelolaan kekuasaan, maka institusi menjadi penjamin dari aturan main dalam pengelolaan kekuasaan tersebut. Institusi politik dapat membebaskan ketika ia membuka ruang bagi siapapun untuk ikut dalam permainan untuk mengambil peran dalam pengelolaan kekuasaan. Sayangnya, institusi politik kita masih membelenggu, alih-alih membebaskan. Dalam institusi politik yang membelenggu, ruang kompetisi tidak terbuka secara bebas, melainkan terbatas hanya bagi yang ingin menopang lingkaran elit pemain *status quo*. Akhirnya, belenggu ini tidak menciptakan ruang insentif yang tepat bagi para politisi untuk mau membawakan ide-

ide perubahan dan perbaikan bagi Indonesia. Alih-alih, sistem politik kita justru memberi insentif bagi kekuasaan untuk melanjutkan kekuasaan melalui koalisi semu berbasis kepentingan.

Dalam negara demokrasi yang institusi politiknya bersifat membebaskan, maka para pemain politik akan merebut suara berdasarkan gagasan. Sebaliknya, ketika institusi politik dalam negara demokrasi justru membelenggu, maka perebutan suara dalam pemilu akan berdasarkan pada tekanan. Tekanan ini berdimensi dua arah. Tekanan horizontal diberikan kepada para elit yang enggan untuk ikut dalam permainan kotor pelanggaran *status quo* sehingga menghambat sirkulasi di tingkat elit. Tekanan vertikal diberikan kepada rakyat di bawah untuk melanggengkan *status quo* dengan memberikan insentif bagi para pendukung dan disinsentif bagi yang enggan.

Ketika elit yang berkuasa menekan elit yang tidak dalam lingkaran kekuasaan, maka konsekuensinya adalah absennya oposisi. Dalam parlemen Indonesia hasil pemilu 2024, oposisi secara *de facto* tidak ada. Tidak bergabungnya beberapa partai politik dalam koalisi pemerintahan tidak didasarkan pada faktor ideologis maupun perbedaan kelas sosio-politik sebagaimana di negara demokrasi lain. Partai yang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan di ranah eksekutif pun tumpul dalam menjadi kekuatan penyeimbang



di parlemen. Kondisi ini disebut oleh Dan Slater (2018) sebagai “Kartelisasi Partai ala Indonesia”.

Kartelisasi partai politik di Indonesia hari ini merupakan hasil dari fragmentasi partai berdasarkan ketokohan, bukan berbasis kelas sosio-ekonomi seperti dalam negara demokrasi lain, termasuk di Asia Tenggara. Padahal, jika berkaca dari pemilu pertama dalam sejarah Indonesia merdeka di tahun 1955, kita pernah memiliki diferensiasi partai berdasarkan ideologi, kelas ekonomi, dan aliran pemikiran yang berkembang di masyarakat. Mirisnya, pasca-reformasi ketika demokratisasi dibuka lebar, partai justru memilih untuk mereduksi gagasan dengan ketokohan, mengganti debat ideologis dengan pelentingan posisi, dan merendahkan kerja teknokrasi dengan bagi-bagi kursi.

Bagi rakyat, kondisi ini semakin menjauhkannya dari ideal demokrasi. Rakyat hanya diberikan pilihan semu pada saat pemilu. Sebab, para elit yang di panggung depan tampak berseteru, di balik layar justru rutin bertemu. Ketika pemilu usai, rakyat ditinggalkan dan para elit melakukan konsolidasi ulang. Sementara yang tertinggal di tengah warga ialah konflik horizontal akibat permainan emosi dan retorika para elit selama pemilu. Kita pun menemui kondisi serba sulit. Sang elit terbelenggu permainannya sendiri, sing alit terbelenggu pilihannya sendiri.

## Demokrasi yang Dipermainkan

Pada akhirnya, apa yang kita saksikan hari ini adalah demokrasi yang dipermainkan. Demokrasi dipermainkan oleh elit ekonomi dan politik yang saling bekerja sama untuk melindungi kepentingan satu sama lain dengan mengorbankan rakyat luas. Akibatnya, meskipun pemilu dijalankan, instrumen, aparatus, hingga proses pemilihan dipermainkan untuk melanggengkan ambisi kekuasaan. Demokrasi tidak diseriusi oleh elit sebagai institusi untuk penciptaan kesejahteraan bersama, melainkan hanya diperalat untuk pelanggaran kekuasaan sesama elit saja.

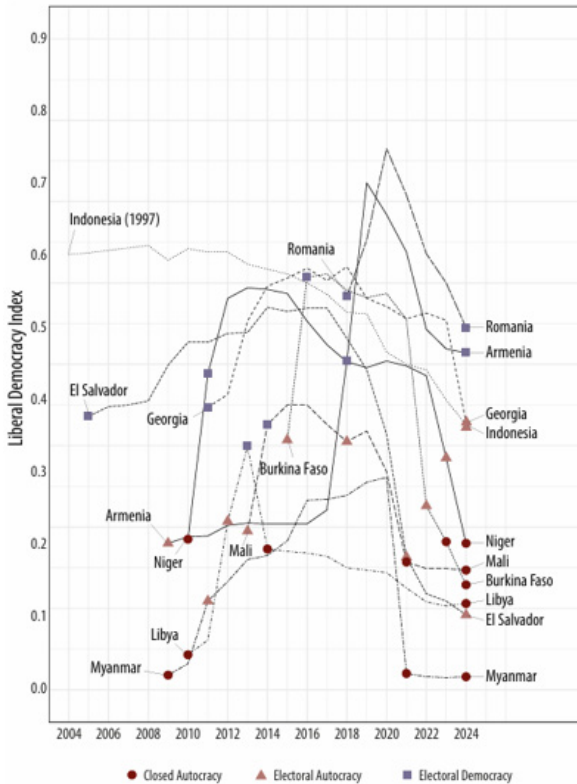
Mengapa hal demikian terjadi? Ketika Reformasi 1998 terjadi, pada dasarnya perubahan politik terjadi melalui dorongan masyarakat sipil secara luas. Sayangnya, ketika Reformasi terus bergulir, kekuatan elit ekonomi dapat terkonsolidasi sedemikian cepat hingga mampu memaksa elit politik untuk mengonsolidasikan ulang demi mempertahankan posisinya. Kondisi ini kita kenal hari ini dengan istilah oligarki. Akhirnya, elit mengambil alih kepemimpinan dalam Reformasi.

Ketika elit memimpin proses demokratisasi, dalam pandangan Albertus & Menaldo (2014), akan rentan terjebak dalam *gaming democracy*. Ketika demokrasi dipermainkan,

para elit akan berkoalisi untuk menjaga lingkaran elit dari pemain-pemain baru yang dapat mengancam keberlanjutan *status quo*. Walau demikian, bagi elit politik, untuk kembali sepenuhnya ke masa otoritarian akan memberi beban ongkos yang terlampaui besar, seperti kehilangan kepercayaan internasional maupun resistensi dari masyarakat sipil. Untuk itu, mereka kemudian akan memilih berada dalam sistem demokrasi semu, seperti mempertahankan keberadaan pemilu maupun oposisi bayangan, tetapi sejatinya sistem yang berjalan adalah otoritarian. Dengan demikian, proses pelucutan institusi demokrasi dapat berjalan dengan lebih mulus.

Mulusnya jalan otokratisasi yang diberi baju demokrasi tampak jelas di Pemilu 2024 lalu. Pemilu 2024 hanyalah hasil, bukan awal, dari *gaming democracy* ini. Ketika kita melihat bagaimana kekuasaan kehakiman konstitusi tanpa tahu malu terlibat dalam perusakan institusi demokrasi, itu bukanlah awal dari rusaknya demokrasi di Indonesia, melainkan titik kulminasi dari keseluruhan proses ekonomi politik yang berjalan pasca-Reformasi. Kondisi ini, dalam pandangan kami, menunjukkan episode Reformasi telah tamat di Indonesia. Arah yang dituju adalah Deformasi, yakni ketika demokratisasi yang dijanjikan oleh Reformasi

tidak tertunaikan dan malah bergerak menuju arah yang berlawanan. Akibatnya, institusi yang dibangun melalui Reformasi satu per satu runtuh terdeformasi (Majiid, 2024).



Gambar 1 10 Negara dengan Tren *Bell-Turn* Terburuk di Dunia (Sumber: V-Dem Report 2025)

Hasilnya hari ini kita rasakan. Data dari lembaga *Varieties of Democracy (V-Dem)* dalam laporan terbarunya di tahun 2025 ini memperlihatkan peringkat demokrasi Indonesia telah turun. Bahkan, penurunan ini juga menggerus predikat demokrasi elektoral (*electoral democracy*) menjadi otokrasi elektoral (*electoral authoritarianism*). Pemburuan demokrasi Indonesia ini pun tercatat sebagai satu di antara 10 negara terparah yang mengalami tren *bell-turn* ini di seluruh dunia. Inilah hasil dari saling berkelindannya kuasa ekonomi dan politik yang mencengkeram dan menenggelamkan demokrasi pasca Reformasi.

## Referensi

- Albertus, M., & Menaldo, V. (2014). *Gaming Democracy: Elite Dominance during Transition and the Prospects for Redistribution*. *British Journal of Political Science*, 44(3), 575–603. <https://doi.org/10.1017/S0007123413000124>
- Boix, C. (2003). *Democracy and Redistribution*. Cambridge University Press.
- Fukuyama, F., Dann, C., & Magaloni, B. (2025). *Delivering for Democracy: Why Results Matter*. *Journal of Democracy*, 36(2), 5–19.

- Majiid, F. A. (2024, June 24). Dari Reformasi ke Deformasi. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/23/dari-reformasi-ke-deformasi>
- Nord, M., Altman, D., Angiolillo, F., Fernandes, T., God, A. G., & Lindberg, S. I. (2025). *Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped? V-Dem Institute*.
- Slater, D. (2018). *PARTY CARTELIZATION, INDONESIAN-STYLE: PRESIDENTIAL POWER-SHARING AND THE CONTINGENCY OF DEMOCRATIC OPPOSITION*. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23–46. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>
- World Bank. (n.d.). *Macro Poverty Outlook*. World Bank. Retrieved May 1, 2025, from <https://www.worldbank.org/en/publication/macro-poverty-outlook>

## Biografi Penulis

Farhan Abdul Majiid merupakan dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia dengan spesialisasi pada Ekonomi Politik Demokrasi Global. Ia menyelesaikan studi Master of Arts in *Transnational Governance* di *European University Institute*, Italia dan Sarjana Sosial dalam Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Minat kajiannya meliputi kajian ekonomi politik global (perdagangan, pembangunan, dan krisis ekonomi), kebijakan global, dan demokrasi dengan fokus kawasan di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Artikel ilmiah yang pernah ia terbitkan, antara lain, *Does Monetary Union Diffuse? The Failure of ECOWAS Monetary Union* (*Jurnal Dinamika Global*, 2024), *Islamic Populism and The Question of Secularism: The Case of Indonesia and Turkey* (*Jurnal Penelitian Politik BRIN*, 2023), dan *Nasionalisme Ekonomi dalam Integrasi Pembayaran Digital Melalui QRIS: The ASEAN Way* (bersama Ikhlas Tawazun, bab dalam buku *Transformasi Digital dan Daya Saing: Seleksi Kasus*, UGM University Press, 2024). Di media massa, tulisan-tulisannya dapat dinikmati di Kompas, CNBC Indonesia, Republika, dan lainnya. Ia dapat dihubungi melalui [famajiid@uii.ac.id](mailto:famajiid@uii.ac.id).

